ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENGIMBANGI PENINGKATAN ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Nama : Dimas Prayoga
Nim : 22 2012 005

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENGIMBANGI PENINGKATAN ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Nama : Dimas Prayoga
Nim : 22 2012 005

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIMAS PRAYOGA
NIM	: 22 2012 005
Program Studi	: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, Maret 2016

Penulis

(Dimas Prayoga)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang**
Nama	:	**Dimas Prayoga**
NIM	:	**22 2012 005**
Fakultas	:	**Ekonomi dan Bisnis**
Program Studi	:	**Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok	:	**Akuntansi Sektor Publik**

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Maret 2016

Pembimbing,

(DR. Sa'adah Siddik, S.E.,Ak.,M.Si)
NIDN/NBM: 0002095507/972321

Mengetahui,
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

(Rosalina Ghazali, S.E.,Ak.,M.Si)
NIDN/NBM: 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Hidup Satu Kali
Hidup Hanya Sesaat
Hidup Harus Dahsyat
Hidup Itu Perubahan, Pilihan dan Prinsip
Maju Terus Pantang Mundur

(Dimas Prayoga)

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ***Mama dan Papa tercinta***
- ***Mamas dan Adikku tersayang***
- ***Keluargaku***
- ***Penyemangatku***
- ***Teman-temanku semuanya***
- ***Almamaterku***

بسم الله الرحمن الرحيم

PRAKATA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puja dan Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dalam mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang paling dasar dalam memberikan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah di Indonesia disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). UU nomor 22 tahun 1992 kemudian dengan revisi UU no 32 tahun 2004, memberikan kewenagan yang luas bagi pemerintah daerah khususnya kota Palembang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk membangun suatu kemandirian daerah kota Palembang maka diperlukan pengeluaran-pengeluaran yang disebut dengan belanja daerah. Belanja daerah yang bermanfaat dan produktif untuk pelayanan publik adalah belanja modal dibandingkan dengan belanja operasi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk melihat pengalokasian dari keduanya terhadap total belanja daerah kota Palembang, kemudian untuk mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal diperlukan pengetahuan adanya faktor penentu kebijakan

penyusunan APBD seperti pertumbuhan ekonomi dan sumber pendanaan salah satunya adalah pendapatan asli daerah kota Palembang. Adapun penulisan laporan penelitiannya dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan Laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tua tercinta (Eddy Purwanto dan Nur Susilawati) yang ber do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si yang telah membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi FEB UMP dan Ibu Welly, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi FEB UMP sekaligus sebagai Pembimbing Akademik.
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, terutama kepada Bapak Betri, S.E., Ak., M.Si., CA yang telah memberikan ilmunya baik praktik maupun teori selama proses perkuliahan berlangsung.

5. Pegawai BPKAD Kota Palembang dan BPS Kota Palembang yang telah membantu dalam proses pengambilan data penelitian.
6. Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Sumatera Selatan yang telah memilih penulis sebagai Tenaga Enumerator periode Oktober, November, dan Desember tahun 2015, karena sebagian penghasilannya meringankan biaya dalam proses pembuatan tulisan ini.
7. Teman-teman Program Studi Akuntansi angkatan 2012, khususnya Paket CA.12 yang telah memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan dalam pembuatan tulisan ini.
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Palembang, Maret 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

PRAKATA vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

ABSTRAK xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA 9

A. Penelitian Sebelumnya 9

B. Landasan Teori 12

1. Konsep Anggaran Sektor Publik 12
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 12
3. Belanja Daerah 14
4. Belanja Modal 15
5. Pendapatan Asli Daerah 18
6. Pertumbuhan Ekonomi 22

BAB III METODE PENELITIAN 25

A. Jenis Penelitian 25
B. Lokasi Penelitian 26
C. Operasional Variabel 26
D. Data yang Diperlukan 26
E. Metode Pengumpulan Data 28
F. Analisis Data dan Teknik Analisis 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Hasil Penelitian 31
1. Gambaran Umum Kota Palembang 31
2. Visi dan Misi Kota Palembang 49
3. Struktur Organisasi Kota Palembang 52
B. Pembahasan Hasil Penelitian 53
1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Kota Palembang 53

2. Analisis Pendapatan Asli Daerah dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Kota Palembang 58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 63

A. Simpulan 63

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

I.1 Perbandingan Belanja Operasi Dan Belanja Modal 4
I.2 Laju pertumbuhan PDRB, PAD dan Belanja Modal 2010-2014 5
II.1 Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian 11
III.1 Operasionalisasi Variabel 26
IV.1 Jumlah Penduduk/kec. dan Menurut Jenis Kelamin 36
IV.2 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Palembang 38
IV.3 Laju Pertumbuhan Rill PDRB ADHK 2010, Tahun 2010-2014 53
IV.4 Distribusi dalam Pembentukan PDRB Harga Konstan 2010-2014 54
IV.5 Laju pertumbuhan PDRB dan Belanja Modal 2010-2014 54
IV.6 Kontribusi Komponen Belanja PAD Terhadap PAD 2010-2014 56
IV.7 Kontribusi Peningkatan PAD dalam Mengimbangi Peningkatan .....
Alokasi Belanja Modal 2010-2014 59

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang 52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset BPKAD 66
Lampiran 2: Surat Pernyataan Selesai Melakukan Riset BPS..... 67
Lampiran 3: Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Qur'an (Surat Pendek) 68
Lampiran 4: Sertifikat Toefl..... 69
Lampiran 5: Sertifikat KKN..... 70
Lampiran 6: Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi..... 71
Lampiran 7: Jadwal Penelitian 72
Lampiran 8: Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi..... 73
Lampiran 9: Data PDRB dan APBD..... 74
Lampiran 10: Biodata Penulis..... 81

ABSTRAK

Dimas Prayoga/222012005/2016/Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan pada kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif.

Hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara investasi diharapkan akan mampu mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal. Peningkatan pendapatan asli daerah kota Palembang, secara keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2014 mampu mengimbangi dan berkontribusi baik dalam membiayai peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang rata-rata sebesar 117%, serta pendapatan asli daerah mampu berkontribusi dalam membiayai sebagian belanja operasi.

Kata kunci: produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, belanja modal, apbd

ABSTRACT

Dimas Prayoga/222012005/2016/Analysis of Economic Growth and Local Revenue Offset Increase in Capital Expenditure Allocation Palembang government/Public Sector Accounting.

The problem of this research is how economic growth and local revenues offset the increase in goverment capital expenditure city of Palembang.

This research was conducted in the city of Palembang. This type of research used in this research is descriptive research, which aims to determine the economic growth and local revenues offset the increase in government capital expenditure city of Palembang. The data used in this research is secondary data. Data collection methods used in this study is documentation. Analysis of the data used in this study is a qualitative analysis. The analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis techniques.

Analytical results from this study can be concluded that efforts to spur and stimulate economic growth by way of investment is expected to be able to offset the increase in capital expenditure. The increase in local revenues of Palembang city, as a whole from 2010 to 2014 is able to compensate and contribute both to finance increased capital expenditure city of Palembang on average by 117%, as well as local revenues to contribute to finance part of the operating expenditures.

Keywords: regional gross domestic product, the local revenue, capital expenditures, budget

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah di Indonesia disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, yaitu dilakukan oleh kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah bersama panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Nurlan, 2007: 13). Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses pengesahan anggaran.

UU No. 22 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004, memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerahnya.

Untuk membangun kemandirian suatu daerah maka perlu adanya pengeluaran-pengeluaran yang disebut sebagai belanja daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah secara umum diatur dalam APBD terdapat tiga yakni, belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah pengeluran yang dilakukan untuk membangun aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigrasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

Bank dunia pada akhir tahun 2011 yang telah mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa belanja modal dapat berpengaruh terhadap kinerja berbagai badan pemerintah. Apabila Pemerintah Indonesia mampu untuk melakukan belanja modal secara bijaksana, maka diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effect* dalam perekonomian nasional (Abdul, 2014: 225). Belanja modal dengan tujuan membangun aset tetap dan aset lainnya berupa sarana prasarana atau infrastruktur adalah untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sumber-sumber pendanaan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan mampu meningkatkan alokasi belanja modal pemerintah daerah, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan publik yang semakin baik serta mampu membangun kemandirian suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek dari pembangunan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintah daerah, karena pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah (Sadono, 2013: 9). Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan sarana prasarana atau infrastruktur yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masayarakat. Dalam kasus pemerintahan didapatkan dari pengalokasian anggaran belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD sebagai tanggung jawab pemerintah daerah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Salah satu pemerintah daerah adalah pemerintah kota Palembang. Kota Palembang memiliki hak dan wewenang yang luas melaksanakan rumah tangganya sendiri termasuk dalam pengalokasian belanja daerah.

Dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif memberikan pelayanan publik dibandingkan dengan belanja Operasi/Rutin. Salah satu prinsip dalam penyusunan APBD, alokasi anggaran harus dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi (Pramono, yanuar, dan Icuk, 2010: 12). Akan tetapi pada kenyataannya pemerintah kota Palembang lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi dari pada belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dari sebagian data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Palembang pada tahun 2010 s/d 2014 berikut ini:

Tabel I.1
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal Kota Palembang
Tahun 2010-2014 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Belanja Operasi		Belanja Modal		Total Belanja
		Jumlah	% Alokasi BO	Jumlah	% Alokasi BM	
1	2010	1.170.671,48	89,35%	139.299,39	10,63%	1.310.205,39
2	2011	1.511.307,63	80,74%	358.928,94	19,17%	1.871.790,57
3	2012	1.714.590,14	81,15%	397.764,04	18,83%	2.112.638,10
4	2013	1.956.326,63	74,19%	678.418,23	25,73%	2.636.707,55
5	2014	2.192.485,63	77,96%	618.886,82	22,00%	2.812.465,37

Sumber: BPKAD Kota Palembang, Hasil Penelitian 2016

Berdasarkan Tabel I.1 menjelaskan bahwa pengalokasian belanja modal terhadap Total Belanja Kota Palembang dari tahun 2010 hingga tahun

2014 hanya memiliki rata-rata 19,38%, bahkan tahun terakhir pengambilan data 2014 masih sebesar 22,00% dan sebesar 77,96% dialokasikan untuk belanja operasi, hal ini menjadi permasalahan karena Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri (11/12/2013) bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pemerintah pusat terus menghimbau pemerintah daerah agar persentase belanja modal terus ditingkatkan sebesar 30%.

Untuk meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal diperlukan pengetahuan mengenai faktor penentu kebijakan dalam penyusunan APBD seperti Pertumbuhan Ekonomi, dan dari sumber pendanaan seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini sebagian data yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Palembang:

Tabel I.2
Laju Pertumbuhan PDRB, PAD dan Belanja Modal Kota Palembang
Tahun 2010 s/d 2014

No.	Tahun	PDRB		PAD		Belanja Modal	
		Rp (Jutaan)	%	Rp (Jutaan)	%	Rp (Jutaan)	%
1	2010	61.145.135,7	-	214.424,10	-	139.299,39	-
2	2011	65.049.465,8	6,4%	359.569,63	67,69%	358.928,94	157,67%
3	2012	70.090.313,7	7,7%	518.858,99	44,30%	397.764,04	10,82%
4	2013	*74.148.370,1	5,8%	558.704,82	7,68%	678.418,23	70,56%
5	2014	**78.173.101,4	5,4%	734.218,68	31,41%	618.886,82	-8,77%

Sumber: BPKAD dan BPS Kota Palembang, Hasil Penelitian 2016

Keterangan :*Angka Sementara, **Angka sangat Sementara, % (Persentase Perubahan)

Berdasarkan tabel I.2 yang merupakan data awal penelitian, menunjukkan bahwa secara keseluruhan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

ADHK tahun 2010 s/d 2014 rata-rata sebesar 6,3%, akan tetapi tahun 2014 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya sebesar 5,4%.

Pertumbuhan ekonomi yang baik seharusnya diikuti dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang didapatkan dari pengalokasian belanja modal. Kegiatan dalam mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal hingga 30% sesuai himbauan pemerintah pusat. Peningkatan belanja modal kota Palembang diharapkan juga mampu dalam berkontribusi memenuhi total keseluruhan capaian belanja modal pemerintahan (pusat), seperti halnya kajian Bappenas dalam BeritaSatu.com (23/11/2015) untuk setiap Rp 85 triliun belanja modal pemerintah, akan berkontribusi 0,8% terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tabel I.2 juga menunjukkan penelitian ini, bahwa besarnya jumlah dan persentase pendapatan asli daerah kota Palembang tidak selalu sebanding dengan besarnya belanja modal, hal tersebut memberikan bukti bahwa belum tercapainya secara keseluruhan daerah kota Palembang dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan belanja modal. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimanakah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal Pemerintah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal Pemerintah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis, penelitian dapat memberikan pengetahuan tentang analisis pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota Palembang.
2. Bagi Pemerintah Kota Palembang, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi, acuan baru dan masukan bagi pemerintah kota Palembang dalam meningkatkan pengalokasian belanja modal terhadap total belanja daerah kota Palembang.

3. Bagi Almamater yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rani, Sinarwati, dan Adi (2014) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten Buleleng. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris dan mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU pada Alokasi Belanja Modal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Dan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Belanja Modal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fahri, jenny dan Sifrid (2013) dengan judul Analisa Kontribusi PAD, DAU, dan DAK atas Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi PAD, DAU, dan DAK atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi sulawesi Tengah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini bahwa PAD tidak berkontribusi atas belanja modal, DAU berkontribusi secara signifikan atas belanja modal, DAK memiliki hubungan yang erat dengan belanja modal pemerintah daerah kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2012) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA) Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh DAU, PAD, SilPA dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal. data sampel terdiri dari 292 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan luas wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada α = 1%. Mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling bessar namun hanya digunakan untuk pengeluaran ruutin, seperti untuk gaji pegawai. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengarug pada alokasi belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Tabel II.1
Ringkasan Persamaan dan Perbedaan Penelitian sebelumnya

No	Peneliti Sebelumnya	Peneliti Sekarang dengan penelitian sebelumnya	
		Persamaan	Perbedaan
1	Rani, Sinarwati, dan Adi (2014)	Persamaan penelitian terletak pada tujuan untuk mengetahui faktor penentu/sumber pendanaan alokasi belanja modal.	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tahun penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi serta Teknik Analisis yang digunakan Kualitatif Deskriptif.
2	Fahri, Jenny dan Sifrid (2013)	Persamaan penelitian terletak pada tujuan untuk mengetahui faktor penentu/sumber pendanaan alokasi belanja modal.	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tahun penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi
3	Kusnandar dan Dodik Siswantoro (2012)	Persamaan penelitian terletak pada tujuan untuk mengetahui faktor penentu/sumber pendanaan alokasi belanja modal.	Perbedaan penelitian terletak pada objek dan tahun penelitian yang digunakan, variabel yang digunakan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi serta Teknik Analisis yang digunakan Kualitatif Deskriptif.

Sumber: Penulis, 2016

B. Landasan Teori

Dalam mendukung dan mempermudah memahami maksud dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, diperlukan gambaran teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Konsep Anggaran Sektor Publik

Penggangaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Menurut Mardiasmo (2009: 61) Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, sehingga penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Sedangkan anggaran publik adalah berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: a. Beberapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran atau belanja). Dan b. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian APBD

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan daerah.

b. Prinsip Penyusunan APBD

Menurut Pramono, Yanuar, dan Icuk (2010: 11-12) dalam menyusun APBD harus diperhatikan beberapa prinsip dasar berikut:

1) Partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan APBD.
2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
3) Disiplin anggaran, adalah a) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur yang secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; b) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan; c) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
4) Keadilan anggaran, alokasi anggaran dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.

5) Efisiensi dan efektivitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.
6) Taat asas, penyusunan APBD tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

3. Belanja Daerah

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Kelompok belanja daerah secara umum diatur dalam APBD yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Berikut diuraikan tiap-tiap kelompok belanja daerah.

a. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Kelompok belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Transfer

Dalam peraturan terdahulu, tidak terdapat kelompok belanja ini. Kelompok belanja transfer muncul setelah adanya PP No. 24 Tahun 2005 dan masih tetap ada dalam SAP PP No. 71 Tahun 2010. Adapun yang dimaksud dengan transfer di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

4. Belanja Modal

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. belanja modal berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan /pembelian /pembebasan /penyelesaian, baik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubunan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan /pembayaran ganti rugu sampaitanah tersebut siap digunakan /dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya kontruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan

biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli, pengadaan/pembelian barang-barang kesenian, barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal dalam APBD sesuai rancangan kepala daerah yang telah disahkan DPRD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Menurut Abdul dan Kusufi (2014: 145) Pelayanan publik itu sendiri adalah identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintah, karena berkenaan langsung dengan salah satu fungsi pemerintah, yaitu memberikan pelayanan. Sebuah kualitas pelayanan publik merupakan cerminan dari sebuah kualitas birokrasi pemerintah.

5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan sumber-sumber PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD Yang Sah.

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pendapatan pajak berbeda bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam Lampiran IIIa dan Lampiran IVa Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut aturan tersebut, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut.

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1) Pajak Hotel
2) Pajak Restoran
3) Pajak Hiburan
4) Pajak Reklame
5) Pajak Penerangan Jalan
6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian C
7) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Pendapatan retribusi menurut Lampiran IIIa dan Lampiran Iva Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari UU No. 28 Tahun 2009

tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota dibagi menjadi tiga, yaitu Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, dan Retribusi perizinan tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Seperti: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar dan lain-lain.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal dan lain-lain.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian sumber daya alam, barang, prasarana umum dan

menjaga kelestarian lingkungan seperti: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan lain-lain.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

1) Bagian laba atas pernyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2) Bagian laba atas pernyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/BUMN.
3) Bagian laba atas pernyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
3) Pendapatan denda pajak dan denda retribusi

Domestik Regional Bruto (PDRB) (Lakip, 2014: 34). PDRB yaitu totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah. Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi (Sadono, 2013: 423).

Menurut Subandi (2014: 133) pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara salah satunya adalah akumulasi modal. akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Salah satu investasi yang diklasifikasikan dari akumulasi modal adalah investasi infrastruktur sosial dan ekonomi yaitu berupa jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi untuk mempermudah dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ekonomi. Akumulasi modal akan menambah sumber daya-sumber daya baru atau meningkatkan kualitas sumber daya yang ada, tetapi ciri-ciri utamanya adalah menyangkut suatu *trade-off* antara konsumsi sekarang dan konsumsi yang akan datang

(memberikan hasil yang sedikit sekarang, tetapi hasilnya akan lebih besar di masa mendatang) (Subandi, 2014 87-88).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014: 53-55) Jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi (penjelasan):

1. Penelitian Deskriptif

   Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (*independen*).

2. Penelitian Komparatif

   Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

   Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada pemerintah kota palembang, dan data diambil melalui:

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Palembang.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Aryo Kesuma Abdul Rohim No. 02 RT 21 RW 08 Kel. Talang Semut Kec. Bukit Kecil Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Pertumbuhan Ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.	1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	PAD adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang Sah
Belanja Modal (BM)	Belanja Modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset (aset tetap dan lainnya) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan Mesin 3. Belanja Bangunan dan Gedung 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Aset Lainnya

Sumber: Penulis, 2016

D. Data yang Diperlukan

Menurut Augustine dan Robert (2013: 90) level informasi yang diperlukan dari sisi sumber data dibedakan dalam tiga bentuk sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh dari pihak pertama tanpa media tertentu.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak melalui media tertentu.

3. Data Tersier

   Data tersier merupakan data yang telah diolah oleh pihak lain dan digunakan sebagai data yang memperkuat latar belakang penelitian dan pembahasannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa:

a. Laporan Realisasi APBD Kota Palembang Tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang. Dari Laporan Realisasi APBD tahun 2010-2014 diperoleh mengenai jumlah alokasi anggaran belanja modal, belanja operasi, PAD.
b. PDRB Kota Palembang 2014 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang. Dari PDRB Kota Palembang diperoleh mengenai pertumbuhan ekonomi/PDRB tahun 2010-2014.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Interview (wawancara)

   Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (angket)

   Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

   Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

   Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi dengan mengumpulkan Laporan Realisasi APBD dan PDRB Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokan menjadi 2, yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu metode analisis dengan menggunakan data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan PAD dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal Pemerintah Kota Palembang.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis kualitatif deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk angka, kemudian data tersebut dianalisis dan dijelaskan menggunakan kalimat mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota

Palembang. Analisis data tersebut merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca atau diinterpretasikan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palembang

(Lakip Kota Palembang, 2014)

a. Geografi

1) Letak Geografis

Kota Palembang merupakan salah satu Kota Metropolitan yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, terletak pada posisi antara 2052' sampai 305' Lintang Selatan dan antara 104037' sampai 104052' Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 40,061 km² atau sekitar 2,65% dari total luas daratan Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir1). Secara administrasi Kota Palembang terbagi atas 16 (enam belas) Kecamatan dan 107 (seratus tujuh) Kelurahan.

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan:

Sebelah Utara: Kabupaten Banyuasin. (berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).

Sebelah Timur: Kabupaten Banyuasin. (berbatasan dengan Balai Makmur Kecamatan Banyu Asin Kabupaten Banyuasin).

Sebelah Barat: Kabupaten Banyuasin. (berbatasan dengan Desa Kecamatan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin).

Sebelah Selatan: Kabupaten Ogan Ilirdan Kabupaten Muara Enim. (berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim).

2) Musim, Suhu, Curah Hujan, Keadaan Angin dan Kelembaban Udara.

Musim yang terdapat di Kota Palembang, sama seperti umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Suhu udara sebagian besar wilayah Kota Palembang pada Tahun 2014 berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badaruddin II2). Berkisar antara 21,40C sampai dengan 36,00C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan November sedangkan suhu udara minimum terjadi di bulan September. Untuk Kecepatan rata-rata angin hampir di seluruh wilayah Kota Palembang pada Tahun

2014 yaitu berkisar 3 knots merata setiap bulannya dengan kecepatan angin tertinggi sebesar 35 knots terjadi di bulan November dan kecepatan angin tertinggi antara 24 knots sampai dengan 35 knots terjadi di bulan November. Selanjutnya untuk curah hujan yang pernah terjadi di Kota Palembang pada Tahun 2014 berkisar 15,2 mm dengan curah hujan terendah pada bulan September sebesar 21,4mm dan bulan Oktober 15,2 mm dan curah hujan tertinggi berada di bulan November sebesar 393,7 mm serta di bulan Desember sebesar 386,4 mm. Kemudian untuk kelembaban udara pada Tahun 2014 rata-rata berkisar antara 74% sampai dengan 85% dengan kelembaban udara tertinggi berkisar antara 97% sampai dengan 100% pada umumnya terjadi di pagi hari. Untuk kelembaban udara terendah umumnya pada siang hari berkisar antara 39% sampai dengan 56%, kelembaban udara terendah lebih umum terjadi pada siang hari terutama pada bulan Agustus sebesar 39%, bulan September sebesar 40% dan bulan Oktober sebesar 39% di Tahun 2014.

3) Topografi.

Kota Palembang terletak pada posisi belahan Timur Pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawan, serta terdapat perbedaan karakter topografi antara Seberang Ulu dengan Seberang Ilir. Bagian wilayah Seberang Ulu pada umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada dibawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi

adalah +3,75 meter sampai dengan ±4,12 meter di atas permukaan laut, kecuali lahan yang telah dibangun dan akan dibangun, di mana permukaan tanah telah mengalami penimbunan *(reklamasi)*. Di bagian Seberang Ilir adanya variasi topografi ketinggian dari 4 meter sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut dan lembah-lembah yang kontinu serta tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai dengan jarak 5 km ke arah Utara Sungai Musi kondisi topografi relatif bertambah dan semakin ke Utara akan kembali menurun. Dengan demikian aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kelerengan atau kemiringan yang besar.

4) Geologi.

Bentuk dan keadaan wilayah Kota Palembang memiliki jenis tanah lapisan alluvial, liat dan berpasir, terletak pada lapisan yang masih muda, banyak mengandung minyak bumi yang juga dikenal dengan lembah Palembang-Jambi. Tanah relatif datar dan rendah, tempat-tempat yang agak tinggi terletak di bagian utara kota. Sebagian Kota Palembang digenangi air, terlebih lagi bila terjadi hujan yang relatif lama.

5) Hidrologi

Kota Palembang terbelah oleh Sungai Musi menjadi 2 bagian besar yaitu daerah Seberang Ulu dan daerah Seberang Ilir terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi adalah sungai

terbesar dengan panjang 15 km, kedalaman 8□12 meter dengan lebar berkisar rata–rata 313-504 meter, Sungai Komering dengan lebar 236 meter, Sungai Ogan dengan lebar rata-rata 211 meter dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. Di samping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya, terletak di Seberang Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan dengan ± 68 anak sungai aktif dan lebar berkisar antara 3-20 meter.

a. Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang3) periode 31 Desember 2014 sebanyak 1.736.551 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 882.216 jiwa dan perempuan sebanyak 854.335 jiwa, menurun 43.955 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 1.780.506 jiwa dibandingkan pada tahun sebelumnya Tahun 2013, dengan laju pertumbuhan penduduk di Tahun 2014 sebesar 4,3%. Terhadap jumlah penduduk tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kota Palembang masih bertumpu di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Sukarami. Tingginya penduduk di tiga kecamatan ini karena di kecamatan tersebut merupakan sentra industri dan sentra pendidikan serta dipengaruhi perbatasan dengan kabupaten lain atau daerah pinggiran kota, rincian jumlah penduduk Kota Palembang per kecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.I
Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Menurut jenis kelamin
Periode 31 Desember Tahun 2014

No.	Kecamatan	Penduduk Tahun 2014		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Ilir barat II	37.447	36.165	73.612
2	Seberang Ulu I	97.241	93.429	190.670
3	Seberang Ulu II	54.094	51.824	105.918
4	Ilir Barat I	75.519	74.240	149.759
5	Ilir Timur I	39.146	39.949	79.095
6	Ilir Timur II	96.260	93.316	189.576
7	Sukarmi	85.723	82.992	168.715
8	Sako	52.008	50.457	102.465
9	Kemuning	46.800	45.791	92.591
10	Kalidoni	63.905	60.648	124.553
11	Bukit Kecil	24.681	24.688	49.369
12	Gandus	35.729	33.738	69.467
13	Kertapati	50.753	47.965	98.718
14	Plaju	49.050	47.546	96.596
15	Alang-Alang Lebar	52.001	50.575	102.576
16	Sematang Borang	21.859	21.012	42.871
Total		**882.216**	**854.335**	**1.736.551**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang 2014

b. Angkatan Kerja

Angkatan kerja merupakan bagian dari aspek demografi penduduk yang mempunyai kecenderungan bertambah atau menurun sejalan dengan perubahan yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 (lima belas) Tahun keatas dalam status bekerja atau sementara tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan berdasarkan data agregat angka partisipasi angkatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang periode 31 Desember 2014 jumlah pencari kerja Kota Palembang di Tahun 2014 sebanyak 7.455.000 pekerja dari jumlah

Penduduk Usia Kerja sebesar 1.082.632 jiwa sehingga Angka Partisipasi Angkatan Kerja dapat dicapai 70,13%.

c. Sosial Budaya

1) Sarana pendidikan

Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pelaksanaan program-program di bidang pendidikan semakin berkembang di berbagai jenis dan jenjang ditunjang dengan sarana pendidikan yang lengkap. Sarana pendidikan seperti jumlah sekolah di Kota Palembang baik negeri maupun swasta pada Tahun Ajaran 2013/2014 sebanyak 1.588 sarana pendidikan yang terdiri dari:

a) Sebanyak 665 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palembang.
b) Sebanyak 402 Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah (SD/MI) di Kota Palembang.
c) Sebanyak 258 Sekolah Menegah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kota Palembang.
d) Sebanyak 133 Sekolah Menegah Umum/Madrasah Aliyah (SMU/MA) di Kota Palembang.
e) Sebanyak 68 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Palembang.
f) Sebanyak 62 Perguruan Tinggi/Universitas.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan Kota Palembang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang di Tahun 2014 sebanyak 329 unit yang terdiri dari:

Tabel IV.2
Jumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang di Tahun 2014

No	Fasilitas Kesehatan	Tahun 2014
1	Rumah Sakit	30 Unit
2	Klinik Bersalin	35 Unit
3	Puskesmas	39 Unit
4	Puskesmas Pembantu	70 Unit
5	Puskesmas Keliling	35 Unit
6	Balai Pengobatan	120 Unit
Total		329 Unit

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Palembang 2014.

3) Kesejahteraan Sosial

Dalam menggambarkan keadaan sosial daerah, diperlukan data mengenai banyaknya fasilitas sosial atau sumber–sumber kesejahteraan sosial dan masalah–masalah sosial yang terdapat di daerah tersebut.

Salah satu fasilitas sosial tersebut adalah panti asuhan. Jumlah panti asuhan di Kota Palembang sebanyak 87 panti asuhan dengan jumlah penghuni sebanyak 2.263 jiwa, yang terdiri dari panti asuhan yang dikelola oleh swasta sebanyak 82 panti asuhan terdaftar di Dinas Sosial Kota Palembang dengan jumlah penghuni sebanyak 1.878

jiwa, dan yang dikelola Pemerintah Kota Palembang di Dinas Sosial sebanyak 5 panti asuhan dengan jumah penghuni sebanyak 385 jiwa

d. Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan, wilayah administrasi Kota Palembang mengalami perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan yang menjadi 16 kecamatan dan 107 kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Kecamatan Ilir Timur I : 11 Kelurahan
2) Kecamatan Kemuning : 6 Kelurahan
3) Kecamatan Ilir Timur II : 12 Kelurahan
4) Kecamatan Kalidoni : 5 Kelurahan
5) Kecamatan Ilir Barat I : 6 Kelurahan
6) Kecamatan Bukit Kecil : 6 Kelurahan
7) Kecamatan Ilir Barat II : 7 Kelurahan
8) Kecamatan Gandus : 5 Kelurahan
9) Kecamatan Seberang Ulu I : 10 Kelurahan
10) Kecamatan Kertapati : 6 Kelurahan
11) Kecamatan Seberang Ulu II : 7 Kelurahan
12) Kecamatan Plaju : 7 Kelurahan
13) Kecamatan Sako : 4 Kelurahan
14) Kecamatan Sukarami : 7 Kelurahan

15) Kecamatan AAL : 4 Kelurahan

16) Kec.Sematang Borang : 4 Kelurahan

Dalam rangka pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Palembang mengimplementasikan pelaksanaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Kota Palembang telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, kemudian diterbitkan pula Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dalam pelaksanaan Pemerintahan sebagai mana diuraikan dibawah ini:

1) Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota, Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota. Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Walikota mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan

mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

a) Sekretaris Daerah

b) Asisten Bidang Pemerintahan (Asisten I).

c) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II).

d) Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III).

e) Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat (Asisten IV).

f) Staf Ahli Walikota terdiri dari:

(1) Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, mempunyai tugas pokok:

Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM.

(2) Staf Ahli Walikota Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Investasi, mempunyai tugas pokok:

Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian, pembangunan dan investasi.

(3) Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok:

Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan dan pendapatan daerah.

(4) Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas pokok:

Membantu Walikota dalam memberikan telaahan mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial, kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah terbagi atas 11 bagian, yaitu:

a) Bagian Tata Pemerintahan.
b) Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana.
c) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
d) Bagian Perekonomian.
e) Bagian Pembangunan.
f) Bagian Sosial Kemasyarakatan.
g) Bagian Keuangan.
h) Bagian Umum.
i) Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Asset Daerah.
j) Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah dan
k) Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah Kota Palembang merupakan unsur staf Pemerintah Kota Palembang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

b) Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan bagian-bagian, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

c) Sekretariat Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, dan tatalaksana dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Point (2) dan (3) tersebut di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

(1) Menyusun kebijakan pemerintah daerah.

(2) Pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

(3) Pemantauan dan evaluasi dari pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

(4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.

(5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat DPRD

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

3) Dinas Daerah Kota Palembang

Dinas Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2012.

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Daerah Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 41 Tahun 2009.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kota Palembang sebanyak 16 (enam belas) Dinas yaitu sebagai berikut:

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
b) Dinas Kesehatan Kota Palembang
c) Dinas Sosial Kota Palembang
d) Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang
e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang
f) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota palembang
g) Dinas PU Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kota Palembang
h) Dinas PU Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang
i) Dinas Tata Kota, Kota Palembang
j) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang
k) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Palembang
l) Dinas Perhubungan Kota Palembang
m) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang
n) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
o) Dinas Kebersihan Kota Palembang
p) Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Palembang

4) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013.

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009.

Lembaga Teknis Daerah merupakan perangkat kelembagaan daerah yang berupa badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang, berfungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu.

Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari, Inspektorat dan 11 (sebelas) Lembaga Teknis. Adapun susunan struktur organisasi 12 (duabelas) Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

a) Inspektorat Kota Palembang

b) BAPPEDA Kota Palembang

c) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Palembang

d) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palembang

e) Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Palembang

f) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kota Palembang

g) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang

h) Badan Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Palembang

i) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

j) Badan Pengelolaan Keuangan (Aset) Daerah Kota Palembang

k) RSUD Palembang BARI

l) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang

5) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010.

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2010.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang merupakan satuan kerja lembaga teknis yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Palembang melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

6) Badan Pelayanan Umum RSUD Palembang Bari

RSUD Palembang BARI dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2013.

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009.

RSUD Palembang BARI mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan program dan kegiatan dibidang rumah sakit sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanannya dan pelayanan informasi mengenai usaha pelayanan kesehatan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan tugasnya.

7) Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja Palembang diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 22 Tahun 2006.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas, memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

8) Lembaga Lain

a) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

b) Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang

Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang. Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang diatur di dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 27 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Narkotika Kota Palembang.

9) Kecamatan dan Keluruhan

Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palembang.

a) Tugas pokok, fungsi Kecamatan Kota Palembang diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan.

b) Tugas pokok, fungsi Kelurahan Kota Palembang diatur didalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kelurahan.

2. Visi dan Misi Kota Palembang

(www.Palembang.go.id)

Sesuai dengan visi dan misi dari Walikota Palembang yang terpilih melalui pilkada langsung Kota Palembang tahun 2013, maka visi pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2018, adalah:

"Palembang Emas 2018"

VISI

PALEMBANG EMAS 2018 yang mengandung makna Palembang Pemerintahan yang Amanah, Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan, Mandiri, Bersih, Aman, Berkembang Pemerintah

Bersih, Ekonomi, Kerakyatan, Religius dan Adil serta mewujudkan Kota Palembang yang Elok, Madani, Aman dan Sejahtera.

MISI

a. Menciptakan Kota Palembang lebih Aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan
b. Menciptakan Tata kelola Pemerintahan Bersih dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat
c. Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan dengan pemberdayaan masyarakat Kelurahan
d. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga terciptanya masyarakat yang Religius
e. Meningkatkan pembangunan yang Adil dan berwawasan lingkungan di setiap sektor
f. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera

Gambar IV.1

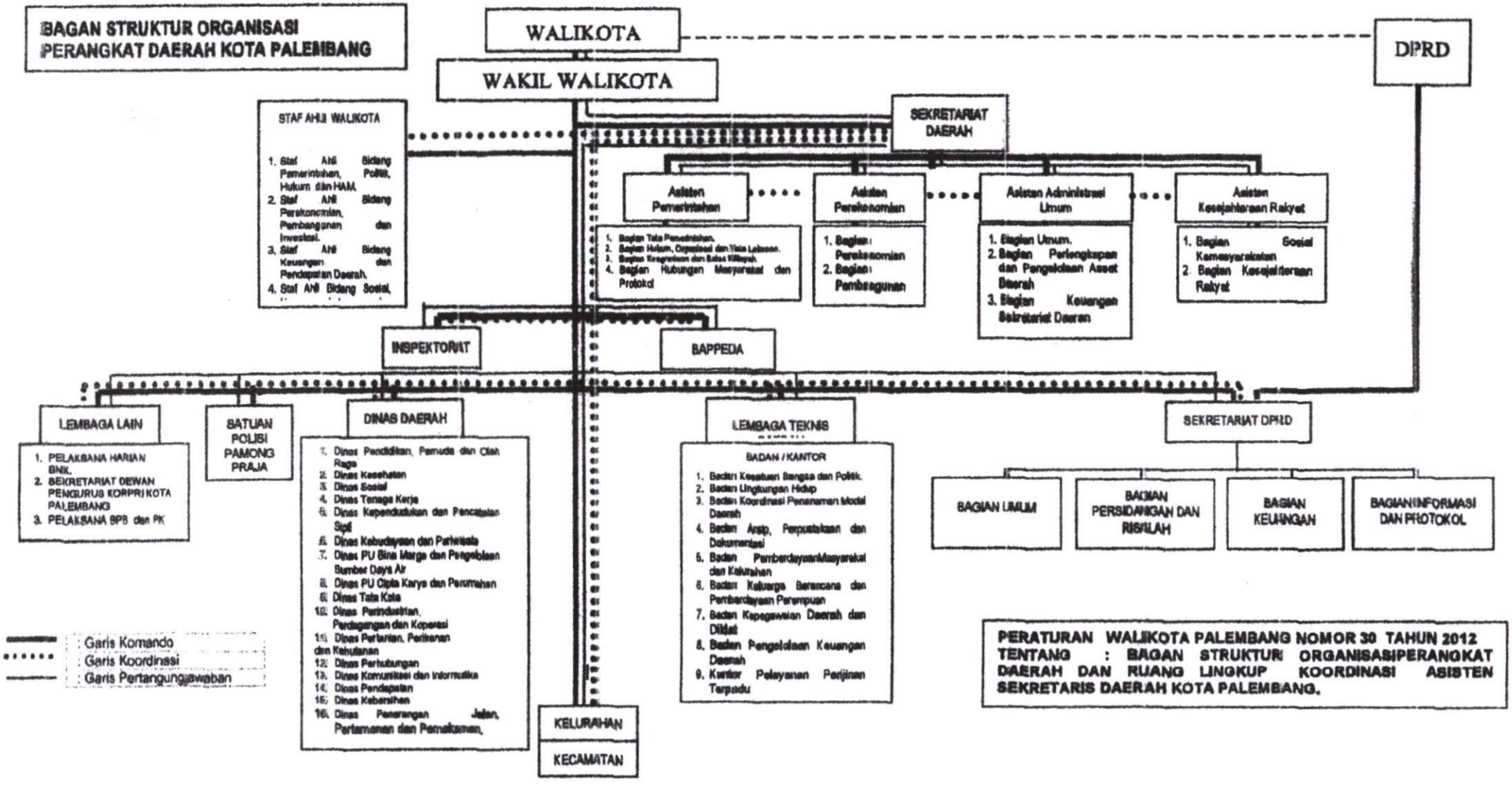

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014 (LAKIP 2014), 2016

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Meningkatkan pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal kota Palembang diperlukan pengetahuan dalam ekonomi makro dan sumber pendanaan. Dalam ekonomi makro mengenai faktor penentu kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seperti pertumbuhan ekonomi kota Palembang, dalam sumber pendanaan untuk membiayai alokasi belanja modal salah satunya adalah pendapatan asli daerah kota Palembang. Pembahasan pada bab ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota palembang.

Analisis pertumbuhan ekonomi dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang

Pertumbuhan ekonomi kota Palembang merupakan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup bagi masyarakat kota Palembang. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penentu kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi kota Palembang adalah dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB harga konstan 2010 dan distribusi

dalam pembentukan PDRB tahun 2010 hingga 2014 kota Palembang, secara lengkap pada tabel IV.3 dan IV.4 berikut ini:

Tabel IV.3
Laju Pertumbuhan Rill PDRB ADHK 2010 Kota Palembang
Tahun 2011 s/d 2014 (Dalam %)

No.	Sektor / lapangan Usaha	Tahun			
		2011	2012	2013*	2014**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,67	5,12	7,86	8,91
B	Pertambangan dan Penggalian	2,95	5,62	4,90	7,82
C	Industri Pengolahan	5,09	5,85	3,28	4,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,83	7,00	9,03	5,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,36	3,04	5,34	5,13
F	Kontruksi	7,63	12,12	9,23	4,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,57	8,08	6,02	4,37
H	Transportasi dan Pergudangan	9,39	7,73	5,73	6,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,17	8,98	3,08	5,69
J	Informasi dan Komunikasi	7,23	8,31	6,12	8,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,71	14,01	9,57	9,15
L	Real Estat	8,81	9,91	9,00	7,26
M, N	Jasa Perusahaan	10,36	8,77	9,40	6,20
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,43	1,51	5,58	3,64
P	Jasa Pendidikan	4,19	4,56	9,94	15,71
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	6,37	8,26	5,59	9,48
R,S, T,U	Jasa Lainnya	3,69	1,10	2,39	3,10
Jumlah PDRB		6,39	7,75	5,79	5,43

Sumber: BPS Kota Palembang, 2016

*Angka Sementara,**Angka Sangat Sementara

Tabel IV.4
Distribusi dalam Pembentukan PDRB Harga Konstan 2010
Kota Palembang Tahun 2010-2014

No.	Sektor / lapangan Usaha	Jumlah (Jutaan Rp) Tahun 2010-2014	% Kontribusi Tahun 2010-2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.861.058	0,533
B	Pertambangan dan Penggalian	15.824	0,004
C	Industri Pengolahan	133.229.353	38,217
D	Pengadaan Listrik dan Gas	453.953	0,130
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.008.125	0,289
F	Kontruksi	55.261.339	15,852
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	46.894.458	13,451
H	Transportasi dan Pergudangan	13.009.244	3,731
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.152.998	2,051
J	Informasi dan Komunikasi	27.649.581	7,931
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	16.808.402	4,821
L	Real Estat	15.173.909	4,352
M, N	Jasa Perusahaan	541.842	0,155
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10.957.082	3,143
P	Jasa Pendidikan	11.480.067	3,293
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	2.696.933	0,773
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4.412.211	1,265
PDRB		348.606.379	100

Sumber: BPS Kota Palembang, Hasil Pengolahan Data 2016

Berdasarkan tabel IV.3 perekonomian Palembang pada tahun 2014 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB kota Palembang tahun 2014 mencapai 5,43% dengan kategori ekonomi yang mengalami peningkatan tertinggi adalah jasa pendidikan sebesar 15,71%. Tabel IV.4 menunjukkan peran kategori ekonomi yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB kota Palembang secara berturut-turut, pada kategori/sektor ekonomi Industri pengolahan sebesar 38%, Kontruksi 16%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda motor 13%, Informasi dan Komunikasi 8%, dan

Jasa keungan dan asuransi berkontribusi sebesar 5% periode tahun 2010 hingga 2014.

Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi kota Palembang adalah akumulasi modal (aset tetap dan aset lainnya). Menambah aset tetap dan aset lainnya dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi oleh pemerintah kota Palembang. Salah satu investasi yang diklasifikasikan akumulasi modal kota Palembang adalah investasi infrastruktur sosial dan ekonomi yaitu berupa jalan raya, listrik, air, sanitasi, dan komunikasi yang dianggarkan pada belanja modal setiap tahunnya, dalam kasus proses pembelian sendiri secara langsung oleh pemerintah daerah kota Palembang.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan belanja modal kota Palembang tahun 2010 hingga 2014 dijelaskan secara lengkap pada tabel IV.5 berikut ini:

Tabel IV.5
Laju Pertumbuhan PDRB dan Belanja Modal Kota Palembang
Tahun 2010 – 2014

Tahun	PDRB		Belanja Modal	
	Rp (Jutaan)	%	Rp (Jutaan)	%
2010	61.145.135,7	-	139.299,39	-
2011	65.049.465,8	6,39	358.928,94	157,67
2012	70.090.313,7	7,75	397.764,04	10,82
2013	*74.148.370,1	5,79	678.418,23	70,56
2014	**78.173.101,4	5,43	618.886,82	-8,77

Sumber: BPKAD dan BPS Kota Palembang, Haasil Pengolahan Data 2016

Berdasarkan tabel IV.5 menunjukkan laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan belanja modal tahun 2010 hingga 2014. Perubahan persentase laju pertumbuhan PDRB dan laju pertumbuhan belanja modal kota Palembang mengalami fluktuasi. Naik dan turun laju pertumbuhan tersebut dapat dilihat

pada komponen-komponen dari kategori PDRB kota Palembang yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB kota palembang, seperti: industri pengolahan, kontruksi, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi serta jasa keuangan dan asuransi. Kategori ekonomi tersebut secara langsung berhubungan dengan perubahan persentase belanja modal kota Palembang yang mengalami fluktuasi.

Upaya memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota Palembang dilakukan dengan cara investasi. Investasi itu sendiri salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kota Palembang, sehingga pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat dan mampu dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang. Ada banyak sumber daya dan potensi kota Palembang yang mampu berkembang, seperti jasa pendidikan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta kategori ekonomi jasa-jasa lainnya yang berpotensi berkembang di kota Palembang. Kegiatan ber-investasi ini diharapkan akan digunakan sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya, sehingga meningkatkan porsi alokasi belanja modal dan upaya mengurangi pengalokasian belanja operasi terhadap total belanja daerah kota Palembang.

Analisis pendapatan Asli Daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang

Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota palembang. Akan tetapi, pada awal pembahasan akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai komponen pendapatan asli daerah yang berkontribusi tertinggi dalam realisasi penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah kota Palembang, sehingga akan terlihat kemampuan peningkatan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang.

Tabel IV.6
Kontribusi Komponen PAD Terhadap Total Penerimaan PAD
Kota Palembang Tahun 2010-2014

Tahun	Keterangan	Jumlah (Rp)	% Kontribusi
2010	**PAD**	**214.424.106.385**	**100,00**
	Pajak Daerah	101.986.353.006	47,56
	Retribusi Daerah	64.321.370.207	29,99
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	23.556.627.059	10,98
	Lain-lain PAD yang Sah	24.559.756.113	11,45
2011	**PAD**	**359.569.637.846**	**100,00**
	Pajak Daerah	207.746.349.410	57,78
	Retribusi Daerah	80.007.121.838	22,25
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	23.168.026.940	6,44
	Lain-lain PAD yang Sah	48.648.139.658	13,53
2012	**PAD**	**518.858.991.832**	**100,00**
	Pajak Daerah	333.104.821.406	64,20
	Retribusi Daerah	106.871.381.610	20,60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	27.403.396.984	5,28
	Lain-lain PAD yang Sah	51.479.391.831	9,92
2013	**PAD**	**558.704.820.167**	**100,00**
	Pajak Daerah	357.230.028.259	63,94
	Retribusi Daerah	118.317.964.616	21,18
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	24.910.466.092	4,46
	Lain-lain PAD yang Sah	58.246.361.199	10,42
2014	**PAD**	**734.218.688.570**	**100,00**
	Pajak Daerah	463.574.599.151	63,14
	Retribusi Daerah	85.109.315.505	11,60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	28.021.442.345	3,82
	Lain-lain PAD yang Sah	157.513.331.568	21,45

Sumber: BPKAD Kota Palembang, Hasil Pengolahan Data 2016

Tabel IV.6 menunjukkan pendapatan asli daerah kota Palembang pada tahun 2010 hingga 2014. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah kota Palembang mulai menggali potensi-potensi pendapatan asli daerah dari daerahnya sehingga pendapatan asli daerah dapat meningkat. Rata-rata penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami peningkatan secara berkala, akan tetapi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah berfluktuasi. Komponen pajak daerah rata-rata sebesar 59,32% dan retribusi daerah rata-rata sebesar 21,12% memiliki kontribusi yang paling tinggi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Hal ini memberikan bukti bahwa peran pajak daerah dan retribusi daerah sangat dominan dalam realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kota Palembang.

Adanya temuan tersebut mengharuskan pemerintah kota Palembang mempunyai pengetahuan dan kemampuan, serta dapat mengidentifikasikan tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Apabila pemerintah kota Palembang tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial, maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah kota Palembang sebagai pemungut, karena pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan kota Palembang tidak optimal.

Pelaksanaan dalam mengalokasikan belanja daerah khususnya belanja modal, tidak diatur secara jelas dalam pemerintah kota Palembang bahwa pendapatan asli daerah, harus berkontribusi baik jumlah maupun persentase untuk mengimbangi belanja modal. Akan tetapi, sumber penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah kota Palembang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik berupa sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dianggarkan dalam alokasi belanja modal setiap tahunnya. Tujuan dari pendapatan asli daerah itu sendiri dalam membiayai belanja modal kota Palembang menggunakan konsep demokrasi –dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendapatan asli daerah yang berasal dari rakyat kota Palembang dan dikembalikan untuk rakyat kota Palembang, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kota Palembang memberikan pelayanan publik.

Dalam pembahasan ini hanya dapat diketahui dan dijelaskan mengenai kontribusi pendapatan asli daerah untuk pembiayaan belanja modal kota Palembang, sehingga akan tercermin peningkatan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang, secara lengkap dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.7
Kontribusi Peningkatan PAD dalam Mengimbangi Pembiayaan
Peningkatan Alokasi Belanja Modal
Kota Palembang Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Belanja Modal	Kontribusi (%)
2010	214.424.106.385	139.299.392.434	153,93%
2011	359.569.637.846	358.928.949.198	100,17%
2012	518.858.991.832	397.764.043.754	130,44%
2013	558.704.820.167	678.418.238.179	82,35%
2014	734.218.688.570	618.886.821.696	118,63%
Rata-Rata			**117%**

Sumber: BPKAD Kota Palembang, Hasil Pengolahan Data 2016

Berdasarkan tabel IV.7 menunjukkan kontribusi peningkatan pendapatan asli daerah dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal pemerintah kota Palembang. Pada tahun 2013 peningkatan pendapatan asli daerah tidak mampu secara penuh mengimbangi dan memberikan kontribusi pembiayaan untuk peningkatan belanja modal kota Palembang tahun 2013. Kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembiayaan alokasi belanja modal tahun 2013 hanya 82,35% atau sebesar Rp 558.704.820.167. Sementara itu, sisa pengalokasian untuk belanja modal kota Palembang sebesar 17,65% atau sebesar Rp 60.182.001.529 kemungkinan sumber pendanaannya berasal dari dana perimbangan-transfer pusat seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau bukan pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, dilihat secara keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2014, secara rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah mampu mengimbangi dan berkontribusi baik dalam membiayai peningkatan

alokasi belanja modal kota Palembang rata-rata tahun 2010 hingga 2014 sebesar 117%, serta mampu berkontribusi dalam membiayai pengalokasian belanja operasi seperti: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja jasa lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan hasil penelitian Rani, Sinarwati, dan Adi (2014) bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal dan diartikan apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan meningkatkan belanja modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Dodik (2012) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi kecil dalam proporsi penerimaan, namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah (belanja modal).

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa: upaya dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Palembang dengan cara melakukan investasi pada kategori ekonomi yang bermanfaat dan produktif, diharapkan akan mampu mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang. Kegiatan ber-investasi ini diharapkan akan digunakan sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya, sehingga meningkatkan porsi alokasi belanja modal dan upaya mengurangi pengalokasian belanja operasi terhadap total belanja daerah kota Palembang. Kemudian, Peningkatan pendapatan asli daerah kota Palembang secara keseluruhan dari tahun 2010 hingga 2014 mampu mengimbangi dan berkontribusi baik dalam membiayai peningkatan alokasi belanja modal kota Palembang rata-rata sebesar 117%, serta pendapatan asli daerah mampu berkontribusi dalam membiayai sebagian belanja operasi.

B. Saran

Pada kesimpulan di atas maka pada bagian ini penulis akan memberikan saran yang mungkin bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah kota Palembang. Penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kota Palembang harus memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi untuk masyarakat, dengan melakukan pergeseran mengenai alokasi belanja daerah dalam APBD, yaitu dalam meningkatkan porsi belanja modal dibandingkan dengan belanja operasi khususnya Belanja Pegawai.
2. Memberikan penyuluhan mengenai pajak daerah guna meningkatkan pemahaman masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat lebih memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan dalam mengimbangi peningkatan alokasi belanja modal.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memberikan tahun penelitian terbaru dan menambah variabel lain yang mampu menjadi faktor penentu dalam penyusunan kebijakan APBD kota Palembang seperti: tingkat inflasi, nilai tukar dan sumber pendanaan untuk membiayai pengalokasian belanja modal seperti: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau Bukan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, edisi ke-4*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Halim dan Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat.

Augustine, Yvonne dan Robert. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Dian Rakyat.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 2015. Prodak Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2010-2014. Palembang.

BeritaSatu.com. 23 November 2015. Belanja Modal Hanya Ungkit Pertumbuhan Ekonomi 0,6%, hlm 1. (www.beritasatu.com/ekonomi/324138-belanja-modal-hanya-ungkit-pertumbuhan-ekonomi-06.html, diakses 23 februari 2016).

Direktorat Jendral Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri. 11 November 2013. Belanja modal pemda harus capai 30 persen, (http://keuda.kemendagri.go.id / artikel / detail / 41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30-persen, diakses 27 Mei 2015).

Fahri, Jenny dan Sifrid. 2013. Analisa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing,* (online), Vol. 4 No. 1 Tahun 2013, (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/download/2585/2117, diakses 09 Maret 2016).

Kusnandar dan Dodik. 2012. Pengaruh DAU, PAD, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *E-Journal, Vol. 15/2012*, (http://www.pdeb.fe.ui.ac.id/?p=6616, diakses 5 Maret 2016).

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014. (http://Palembang.go.id/Lakip/tahun/2014, diakses 14 Oktober 2015).

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Pramono, Yanuar dan Icuk. 2013. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat.

Rani, Sinarwati, dan Adi. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan akuntansi Program S1,* (online), Vol. 2 No. 1 Tahun 2014, (Http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/ S1ak/article/ download/4394/3393, diakses 22 Februari 2016).

Sadono Sukirno. 2013. *Makroekonomi Teori Pengantar, edisi ke-3.* Jakarta: Raja grafindo Persada.

Subandi. 2014. *Ekonomi Pembangunan, cetakan ke-3.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka No. 1
Telpon 350006 (FAX : 0711 – 372384) Kode Pos 30131
P A L E M B A N G

Palembang, 7 Maret 2016

Kepada

Nomor : 461/BPKAD/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : --
Hal : Izin Pengambilan Data

Yth. Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
di-
PALEMBANG

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Dimas Prayoga
N I M : 222012005
Judul Proposal/Skripsi : Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dalam Mengimbangi Peningkatan Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Izin Pengambilan Data mulai tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 26 April 2016 untuk bidang pekerjaan Akuntansi Keuangan Daerah dengan hasil : Baik

Demikian disampaikan untuk bahan pengaturan selanjutnya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG,

BPKAD

Z U L F A N, AK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP196105181982031001

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PALEMBANG

Nomor : B-110/BPS1671/2890/02/2016
Lampiran : -
Perihal : Data Statistik

Palembang, 18 Februari 2016

Kepada Yang terhormat
Kepala Tata Usaha
Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Sehubungan dengan surat saudara nomor 2061/H-5/FEB-UMP/II/2016 tanggal 11 Februari 2016 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang yang bernama **Dimas Prayoga** memang benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data statistik pada Perpustakaan BPS Kota Palembang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Dalam Mengimbangi Peningkatan Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang" pada bulan maret 2016.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

An. Kepala BPS Kota Palembang
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Rosilawati, S.Sos
NIP. 196106221980122001

Jalan Pangerang Aryo Kesuma Abdul Rohim No.2 Kel. Talang Semut Palembang
Telp / Fax : 0711-352184, email : bps1671@bps.go.id

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

518/J-10/FEB-UMP/SHA/IX/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA	:	**DIMAS PRAYOGA**
NIM	:	**222012005**
PROGRAM STUDI	:	**Akuntansi**

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 28 September 2015
an. Dekan
Wakil Dekan IV

Drs. Antoni, M.H.I.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263
Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637
email. lembagabahasaump@yahoo.co.id

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name	:	Dimas Prayoga
Place/Date of Birth	:	Palembang, March 17th 1994
Test Times Taken	:	+1
Test Date	:	February, 25th 2016

Scaled Score

Listening Comprehension	:	43
Structure Grammar	:	42
Reading Comprehension	:	38
OVERALL SCORE	:	410

Palembang, February, 29th 2016
Head of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd.,M.A
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 168/TEA FE/LB/UMP/II/2016

Testimonials

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

بسم الله الرحمن الرحيم

PIAGAM

No. 030/H-4/LPKKN/UMP/IX/2015

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama	: DIMAS PRAYOGA
Nomor Pokok Mahasiswa	: 222012005
Fakultas	: EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir	: PALEMBANG, 17-03-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-9 yang dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 3 September 2015 bertempat di:

Kelurahan/Desa	: Kenten Laut
Kecamatan	: Talang Kelapa
Kota/Kabupaten	: Banyuasin
Dinyatakan	: Lulus

Palembang, 30 September 2015

Mengetahui

Rektor

Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.

Ketua LPKKN,

Ir. Alhanannasir, M.Si.

بسم الله الرحمن الرحيم

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MA MAHASISWA :	**Dimas Prayoga**	PEMBIMBING	
M :	**22 2012 005**	KETUA	: **DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si**
OGRAM STUDI :	**Akuntansi**	ANGGOTA	:

DUL SKRIPSI : **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENGIMBANGI PENINGKATAN ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

O.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	13/2/2016	Bab 1	[signature]		Perbaiki
2	15/2/2016	Bab 2.	[signature]		Teori yg digunakan sesuai kontinuasi
3					Penbahas yg bab 4
4	18/2/2016	Bab 3	[signature]		Perbaiki
5	02/03/2016	Bab 4	[signature]		Penbahasan terus
6					terkait dg variabel yg lainnya gangan berdiri sendi
7	05/03/2016	Bab 5	[signature]		
8					
9	08/03/2016	Bab 1 s/d 5.	[signature]		Perbaiki lagi
0	08/03/2016	Daftar Isi, Abstrak. dll			
1					
2	09/03/2016	Daftar Isi	[signature]		Perbaiki
3	09/03/2016.	Abstrak dl.			
4					
5	11/03/2016	Skripsi	[signature]		Ace ujian
6					

ATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi :

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si

Jadwal Penelitian

Keterangan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Survei Pendahuluan																								
Laporan Survei Pendahuluan																								
Proposal																								
Seminar Proposal																								
Revisi Seminar																								
Pengambilan Data																								
Pengolahan Data Analisis																								
Hasil Penelitian																								
Penggandaan Penelitian																								
Ujian Komprehensif																								
Perbaikan Skripsi																								

Sumber: Penulis, 2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI — Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1) — Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014 (B)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1) — Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011 (B)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3) — Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010 (B)

: umpalembang.net/feump — Email : feumplg@gmail.com

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بسم الله الرحمن الرحيم

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal	: Selasa, 22 Maret 2016
Waktu	: 13.00 s/d 18.00 WIB
Nama	: Dimas Prayoga
NIM	: 22 2012 005
Program Studi	: Akuntansi
Mata Kuliah Pokok	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENGIMBANGI PENINGKATAN ALOKASI BELANJA MODAL PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si, CA	Pembimbing	8/4 - 2016	
2	DR. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si, CA	Ketua Penguji	8/4 - 2016.	
3	Lis Djuniar, S.E., M.Si	Penguji I	4/4 2016	
4	Welly, S.E., M.Si	Penguji II	31/3/2016	

Palembang, Maret 2016
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Rosalina Ghozali, SE.Ak.M.Si
NIDN/NBM : 0228115802/1021960

BIODATA PENULIS

Nama : Dimas Prayoga

NIM : 22 2012 005

Tempat/ Tanaggal Lahir : Palembang, 17 Maret 1994

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Kopral Urip Lr. Kesuma Bangsa No. 67 Rt 38 Rw 11 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Palembang

No. HP : 0857 5844 3068

Nama Orang Tua

Ayah : Eddy Purwanto

Ibu : Nur Susilawati

NO	RIWAYAT PENDIDIKAN	ALUMNI
1	SD	SD YKPP 1 (Patra Mandiri 1) Plaju Palembang
2	SMP	SMP N 15 Palembang
3	SMA	SMA Shailendra Palembang

Palembang, Maret 2016

Penulis,

(Dimas Prayoga)